

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas public yang nyata, yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim,2001). Selanjutnya undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggung jawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik (LAN, 2003).

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat pemerintahan kepada public tentang kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksudkan Bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan.

Tugas pokok dan fungsi organisasi di masing–masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepat dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Kusumaningurum (2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sistem pengendalian akuntansi yang berbasis akuntansi atau system pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah system perencanaan, system pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Sistem pengendalian internal dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau system yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan.

Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat

pertanggung jawaban Beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. (Arif, 1995 dalam Beny, 2012).

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, anggaran juga merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan. Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelasakan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran. **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupatn Rokan Hulu.
2. Bagaimanakah pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKDP Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bagaimanakah pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu?.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Kantor

Sebagai bahan untuk pegawai SKPD yang terlibat dalam penyusunan anggaran agar lebih memahami Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah supaya dapat menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih baik.

2. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang di dapat dari bangku kulliah dengan praktek dilapangan.

3. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.5 Batasan Masalah dan Originallitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dan mengingat bahwa luasnya masalah yang akan diteliti maka peneliti membatasi pada Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Kabupaten Rokan Hulu).

Tabel 1.1 SKPD Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Dinas, Badan dan Kantor
1	Sekretariat Daerah
2	Sekratariat Dewan
3	Inspektorat
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
10	Dinas Perternakan dan Perkebunan
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Satuan Polisi Pamong Praja
21	Dinas Perhubungan
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip
23	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
----	-------------------------------------

Sumber: Sekretariat Daerah

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Oleh Mei Anjarwati, Universitas Negeri Semarang Tahun 2012 yang berjudul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja seperti terlihat pada nilai t hitung $3,742 >$ t-tabel $2,00404$ dan tingkat signifikansi $0,000$ variabel independen.

Hasil pengendalian akuntansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja seperti terlihat pada nilai t hitung $1,196 <$ t-tabel $2,00404$ dan tingkat signifikansi $0,237$ variabel independen.

Dan Hasil sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja seperti terlihat pada nilai t hitung $4,986 >$ t-tabel $2,00404$ dan tingkat signifikansi $0,237$ variabel independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian dan tahun amatan. Objek penelitian ini adalah terdaftar di SKPD Kabupaten Rokan Hulu, tahun amatan 2020 sedangkan penelitian Mei ajarwati objeknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Tegal dan Pemalang tahun 2012.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel penelitian, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh beserta pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat pemerintahan kepada publik tentang kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksudkan bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimasing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepat dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (LAN, 2003:3).

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwaju dan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggung jawaban secara periodik.

Mardiasmo (2012:21) secara ringkas mengatakan akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seorang steward kepada pemberitanggung jawab.

Setiap instansi pemerintah, Badan dan Lembaga Negara diPusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.(LANRI dan BPKP2013:43).

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang

secara fungsional bertanggung jawab melayani, fungsi administrasi di instansi. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Proses pertanggung jawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik, berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, pertama; Relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap. Kedua: Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variability, netralitas. Ketiga: dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan keempat dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas, yaitu:

1. Prinsip pertanggung jawaban, lingkungannya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan.

2. Prinsip pengecualian, melaporkan hal-hal yang penting-penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu.
3. Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit yang lain.
4. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal.
5. Prinsip manfaat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah SKPD dilaksanakan secara periodic yang mencakup:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk Laporan Finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan

Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh bendaharaan umum negaran dan entitas laporan yang menyusun laporan keuangan konsoladasinya. Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

2.1.1 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, agar

pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah

rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut.

Merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Halim dan Syam Kusufi (2012) mengatakan bahwa anggaran memiliki peranan penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik

merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah (Syafrial, 2009). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran merupakan Pernyataan mengenai testimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial(Mardiasmo, 2009:61)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) salah satu diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan SKPD untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah (Nadirsyah, dkk, 2012).

Menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012:64) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut.

Anggaran pendapatan dan belanja negaraa dalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang di setujui oleh dewan perwakilanrakyat. APBN berisikan daftar sistematis dan terperinci yang memuatkan rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran(1 januari– 31 desember).

Menurut Steersdab Porter (1976) dalam Putra(2013) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

1. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Putra (2013), menyatakan bahwa keuntungan kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.
2. Membantu menjelaskan apa-apa yang diharapkan. Sasaran anggaran yang jelas akan memberikan gambaran yang akan dicapai.
3. Menghilangkan kejenuhan.
4. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja yang dicapai.
5. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerjaan secara spontan yang mana lebih lanjut akan meningkatkan kinerja mereka,. Setiap pekerja akan termotivasi. Untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami arah organisasi dengan mengetahui sasaran yang jelas.
6. Meningkatkan kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
7. Membangkitkan rasa mampu dalam bekerja sehingga akan meningkatkan kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja.

Keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

2.3 Pengendalian Akuntansi

Secara umum pengendalian merupakan bagian dari masing-masing sistem yang di gunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional organisasi.

Menurut definisi, pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana.

Sistem pengendalian internal dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan.

Kusumaningrum (2010) mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sistem pengendalian akuntansi yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah suatu prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang

termasuk pengendalian akuntansi adalah system perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan Perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya, melalui pengukuran prestasi kerja dengan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistic, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan organisasi. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah.

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians(selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Pengendalian Akuntansi Menurut Krismiaji (2010:18) adalah sebagai berikut “Pengendalian Akuntansi (AccountingControls) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.”

2.3.1 Manfaat Pengendalian Akuntansi

Menurut William K.Carter (2009:14) manfaat dari pengendalian akuntansi yang didalamnya adalah mengenai pengendalian biaya adalah tanggung jawab atas pengendalian biaya.

Pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu-individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menanggarkan biaya yang berada dibawah kendali mereka. Didalam pengendalian biaya terdapat istilah standard Standard memberikan suatu tolok ukur yang lebih baik mengenai prestasi pelaksanaan. Penggunaan standard akan mengoreksi semua bidang dimana terjadi biaya yang berlebihan yang mungkin tidak diketahui tanpa adanya standard.

2.4. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi variasi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. (Hidayattullah dan Irene Herdjiono).

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan untuk menilai kinerja organisasi.

Bastian (2010:297) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggung jawabkan. Pelaporan merupakan wujud dari proses dari akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis,

periodik dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintahan dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintahan. Pelaporan kinerja oleh Instansi pemerintahan ini dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Sistem merupakan kumpulan elemen – elemen baik yang berbentuk fisik maupun non fisik yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih sasaran atau akhir dari sistem. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, manajemen, transparan, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja (penyusunan standar akuntansi pemerintah (PSAP) kerangka konseptual:2010).

Berdasarkan peraturan pemerintah no 17 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP). Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis actual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(laporan perubahan SAL)

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional(LO)
- e. Laporan Arus Kas(LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)
- g. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Prinsip pertanggung jawaban, lingkungannya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan.

1. Prinsip pengecualian, melaporkan hal-hal yang penting-penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu.
2. Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit yang lain.
3. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal.
4. Prinsip manfaat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya.

Laporan umpan balik (feedback)diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku

pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum,2010).

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah(SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi APBD (Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu (timelines) menunjukkan pada interval waktu antara kebutuhan informasi dengan tersedianya informasi yang diinginkan oleh pengguna yang berbeda dan frekuensi pelaporan informasi. Sistem pelaporan dalam penelitian ini di konseptualkan menjadi tiga dimensi yaitu

1. kecepatan membuat laporan,
2. laporan yang berbeda pada pengguna yang berbeda,
3. frekuensi laporan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kerja yang di capainya. Proses pertanggung jawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain:

- a. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap.
- b. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variability, netralitas/
- c. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
- d. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, AndrianidanHatta (2011).

Sistem Pelaporan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan akuntabilitas adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.

Riani (2015: 5) Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara umum, tujuan dan fungsi dari pelaporan keuangan adalah:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan,
- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan,
- 3) Perencanaan dan Informasi,
- 4) Kelangsungan Organisasi,
- 5) Hubungan Masyarakat,
- 6) Sumber Fakta dan Gambaran.

Laporan harus mencakup ramalan tahunan, laporan harus mencantumkan penjelasan mengenai: Sebab varians (penyimpangan), tindakan yang diambil

untuk mengoreksi varians yang tidak menguntungkan, waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi bisa efektif.

Menurut Mardiasmo (2009) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan. Dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren dan target waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantumu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (publikrelation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (sourceoffactsandfigures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Sedangkan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomiyang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

2.4.1 Laporan kinerja

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil dari dicapai dari masing-masing program sebagaimana. Ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi laporan kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kejadian anggaran(RKA) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait.

Mentri/pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran menyusun laporan kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja dihasilkan dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi dan dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, system penganggaran, sistem pembendaharaan dan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) tersebut setidaknya-tidaknya mencakup pengembangan keluaran masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

2.5 Penelitian yang relevan

1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mei Anjurwati,2012).

Hasil penelitian adalah Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di MARAUKE(Afilu Hidayattullah, IrineHerdjiono Universitas Musamus Merauke2015).

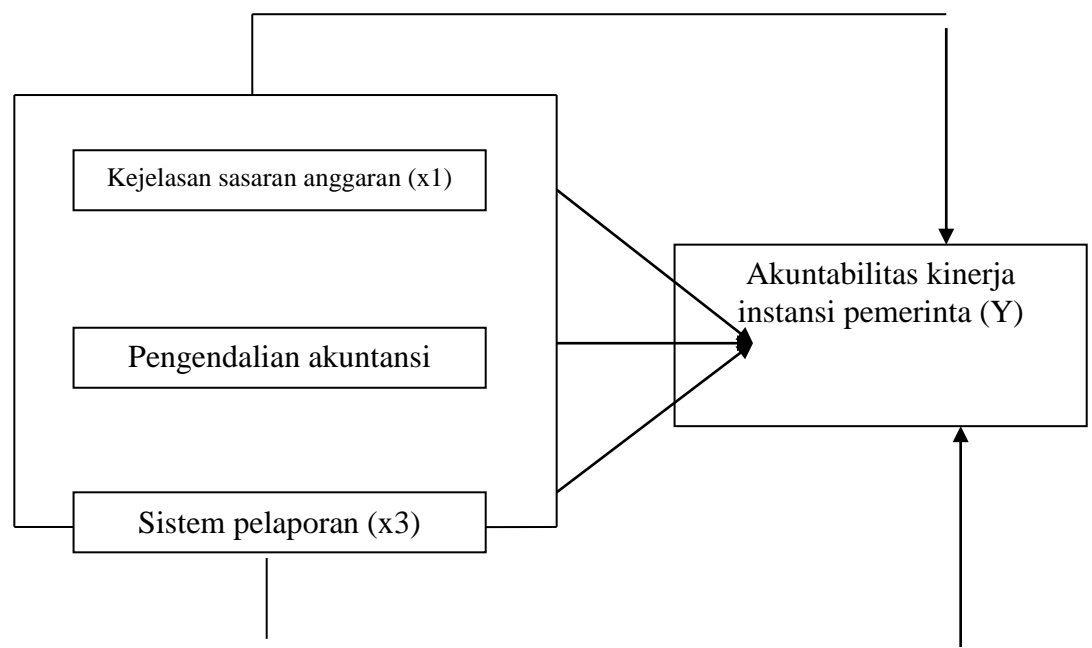
Hasil penelitiannya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. (Eko setiawan Fakultas ekonomi universitas Riau2013)

Hasil penelitiannya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dalam penelitian dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 :Diduga bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD diKabupaten Rokan Hulu.
- H2 :Diduga bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD diKabupaten Rokan Hulu.
- H3 :Diduga bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD diKabupaten Rokan Hulu.
- H4 :Diduga bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara bersama–sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD diKabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten RokanHulu. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendali anakuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variable dengan variable lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan sebagai variabel independen dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variable dependennya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017).Populasi pada penelitian ini adalah seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 29 SKPD.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 29 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD dan kepala bagian keuangan pada masing-masing SKPD.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Teknik pengambilan yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:122) sampling jenuh adalah "teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil". Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan cara survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden, demikian pula pengembalianya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Operasional merupakan suatu tindakan yang membuat batasan-batasan yang akan digunakan dalam analisis. Adapun yang akan di analisis adalah hubungan antara variable bebas dengan variable terikat.

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variable yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. pengamatan akan dapat mendeteksikan atau pun menerangkan variable dalam variable terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan butir soal 1-6 skala linkert serta idikator sebagai berikut:

- a. Program dan kebijakan
- b. Analisis keuangan
- c. Pengecekan jalannya program
- d. Kurangnya insentif/imbalan/pengakuan positif.
- e. Pertanggung jawaban pimpinan dan karyawan
- f. Keterlibatan dalam evaluasi hasil

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variable terikat (*dependent variable*) dan

Mempunyai pengaruh positif atau pun negative bagi variable terikat nantinya.

Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah:

a. Kejelasan sasaran anggaran(X1)

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dengan butir soal 1-6 skala linkert serta indikator sebagai berikut:

1. Jelas dan spesipik
2. Tidak membingungkan
3. Tingkat kepentingan
4. Jelasnya outcome/dampak/manfaat
5. Pentingnya sasaran anggaran
6. Jelas dan terukurnya

tujuan

b. Pengendalian akuntansi (X2)

Pengendalian Akuntansi Menurut Krismiaji (2010:18) adalah sebagai berikut “Pengendalian Akuntansi (Accounting Controls) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan”. Dengan butir soal 1-4 skala linkert serta indikator sebagai berikut:

1. Audit
2. Evaluasi
3. Penetapan target
4. Perencanaan jangka panjang dan jangka pendek

c. Sistem pelaporan (X3)

sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Dengan butir soal 1-3 skala linkert serta indikator sebagai berikut:

1. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas
2. Prosedur pelaksanaan anggaran
3. Jelas dan terperinci catatan penggunaan anggaran

3.6.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, didalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner. Suatu instrument dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi persyaratan yaitu uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel. nilai thitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan disetiap variabel dan dianalisis dengan program

SPSS dan outputnya bernama *corrected item correlation*. Untuk mendapatkan t_{tabel} dilakukan dengan *Table product moment*. Tingkat kevalidan dan indikator atau kuesioner dapat ditentukan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dikatakan valid, dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak valid.

2. Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas adalah uji tingkat kesetabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas, semakin stabil pula alat pengukur tersebut dan sebaliknya jika reliabilitas alat pengukur tersebut rendah maka alat yang dimiliki tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas menggunakan uji *cronbach's alpha* (α) yaitu jika $\alpha > 0,60$ maka variabel dikatakan reliabel atau handal.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi dan pengujiannya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak software statistical package for science atau statistical product and service solution (SPSS) dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda (Multiple Regression Analysis).

3.7.1 Statistik deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk

selanjutnya dilakukan analisis data pengukuran tersebut. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dikategorikan menurut kriterianya masing-masing dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa secara deskriptif berdasarkan teori-teori yang ada.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal. Analisis yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan uji *kolmogrof-smiernov test* dengan ketentuan jika nilai signifikan *kolmogrof-smiernovtest* pada variabel lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha > 0,05$) yang telah ditetapkan maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *kolmogrof-smiernovtest* pada variabel Lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha < 0,05$) maka tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidak samaan variance residual satu pengamatan kepengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui dan mengukur ada atau tidak pengaruh antara beberapa variable independen, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan memanfaatkan software statistic SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). Menurut Sugiyono, persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas kinerja

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisiensi regresi

X₁ = Kejelasan sasaran anggaran

X₂ = Pengendalian akuntansi

X₃ = Sistem pelaporan

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) adalah persamaan statistic yang digunakan untuk mengetahui ketepatan hubungan satu variabel atau lebih terhadap variabel dependennya dalam satu persamaan regresi linier berganda. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R²). Dalam aplikasi SPSS angka yang digunakan untuk melihat koefisien determinasi

yaitu angka R^2 adjusted, dikarenakan variable independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.

3.7.5 Uji Signifikan Secara Individu (Uji t)

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara individual terhadap variable terikat (dependen). Dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat ditentukan H_0 diterima atau H_0 ditolak.

Jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).

3.7.6 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersamaan (kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan) terhadap variable terikat yaitu akuntabilitas kinerja.

Jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).